

STRATEGI PENERAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KOTA MEDAN SEKTOR PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Regen Harahap¹, Tia Fany Simbolon²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara

evikuritongahrp6874@gmail.com

²Raudhatul Jannah, Universitas Islam Sumatera Utara

danielmhd99@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini membahas strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM serta pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan. Berdasarkan hasil kajian, beberapa kesimpulan dapat diambil untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Medan. Dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM, disarankan penyusunan peraturan daerah terkait penjaminan kredit, pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM), dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah untuk meningkatkan akses permodalan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kemitraan antara koperasi dan perbankan, serta membentuk Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi dan sarana promosi seperti trade center. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, strategi yang diusulkan meliputi peningkatan efektivitas promosi melalui teknologi informasi, pengembangan sistem informasi pariwisata terintegrasi, dan pengembangan varian produk wisata. Selain itu, diperlukan harmonisasi aturan, peningkatan keamanan dan akses ke tujuan wisata, kemitraan masyarakat dalam kepariwisataan, serta penyusunan standar usaha dan kompetensi SDM. Penyusunan cetak biru pariwisata juga menjadi langkah penting untuk pembangunan jangka panjang di Kota Medan.

This study discusses the empowerment strategy of cooperatives and MSMEs and the development of the tourism and creative economy sectors in Medan City. Based on the results of the study, several conclusions can be drawn and recommended to the Medan City Government. In an effort to empower cooperatives and MSMEs, it is recommended to formulate regional regulations related to credit guarantees, development of microfinance institutions (LKM), and facilitation of land rights certification to increase access to capital. The government also needs to facilitate partnerships between cooperatives and banks, as well as establish a Business and Technology Information Center and promotional facilities such as trade centers. In the tourism and creative economy sectors, the proposed strategies include increasing the effectiveness of promotion through information technology, developing an integrated tourism information system, and developing tourism product variants. In addition, it is necessary to harmonize regulations, improve security and access to tourist destinations, community partnerships in tourism, and prepare business standards and HR competencies. The preparation of a tourism blueprint is also an important step for long-term development in Medan City.

Keywords: Strategi Pengembangan Ekonomi, Sektor Pariwisata, UMKM.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mampu memberikan stimulus terhadap perekonomian daerah. Menurut (Pratiwi et al., 2024);(Gholamzadeh Chofreh et al., 2016) Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali dengan pendapatan riil perkapita pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada gilirannya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah dalam berotonomi.

Menurut (Bahasoan et al., 2024) menegaskan bahwa pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik di setiap daerah termasuk Pemerintah Kota Medan. Konsekuensinya, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan *sharing* dari pemerintah pusat untuk menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, daerah diharapkan mampu menarik investor sebanyak mungkin untuk mau berinvestasi didaerahnya dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu menimbulkan efek *multiplier* yang besar bagi perekonomian daerah Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011. Walaupun disadari bahwa setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu dilakukan sesuai potensi ekonomi yang dimiliki. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah yang ada di Indonesia.

Adanya keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Melalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana, masyarakat dan para investor dapat menjadi motor penggerak dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi dan perlu mengoreksi kebijakan pembangunan ekonomi yang keliru. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah potensi ekonomi yang dimiliki dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis (Al Syahrin, 2018).

Untuk mencapai tujuan dimaksud, pemerintah daerah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah (RPJMD dan PRJPD) sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakannya (RKPD) (Sari et al., 2022). Subtansi pokok dari tindak lanjut amanat dokumen RPJMD dan RPJPD adalah mendefinisikan arah pembangunan ekonomi yang ingin dicapai oleh daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah. Urgensi mendefinisikan arah pembangunan daerah disebabkan adanya kecenderungan perubahan dinamis kondisi lingkungan perekonomian global, nasional maupun regional yang sangat cepat dan sulit diprediksi (Sukri et al., 2023).

Perubahan dinamis kondisi perekonomian tersebut, pada satu sisi menuntut adanya respon/tanggapan yang cepat dari seluruh *stakeholders* perekonomian terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Sementara disisi yang lain, tantangan yang kompleks dalam proses pembangunan tersebut menuntut adanya percepatan penuntasan masalah-masalah yang dihadapi. Untuk itu, dalam kerangka mendefinisikan arah pembangunan ekonomi daerah tersebut pada tahap implementasi dibutuhkan adanya : *Pertama*, bahan tolak ukur berbagai dokumen perencanaan yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program serta kegiatan yang terpadu dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan *Kedua*, dibutuhkan adanya parameter/indikator yang dapat memudahkan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh seluruh elemen perangkat daerah. Dengan dukungan itu semua dan ditambah dengan sinergi adanya kesamaan persepsi semua pemangku kepentingan perekonomian, maka akselerasi percepatan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat lebih cepat terwujud (Hussain & Nadeem, 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan pada saat ini sangat diperlukan bagi pembangunan Kota Medan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang melekat dalam proses pembangunan kota, seperti melimpahnya angkatan kerja, ketersediaan lapangan kerja yang sedikit dan bertambahnya masyarakat miskin perkotaan. Sejalan dengan

permasalahan yang ada dan munculnya perubahan sikap masyarakat dalam pembangunan kota serta terjadinya pergeseran fungsi kota dalam konteks global maka dibutuhkan arah pembangunan kota yang tidak saja mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk perkotaan tetapi juga pada pengembangan ekonomi kota yang berkualitas dan berkesinambungan (Hutapea et al., 2020);(Prayoga, 2023).

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menindaklanjuti arah perkembangan perekonomian Kota Medan pada saat ini sehingga dapat diperoleh pedoman dalam kebijakan pengembangan perekonomian secara nyata. Pedoman tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi perekonomian yang ada dan mampu mengatasi permasalahan dalam pengembangan perekonomian Kota Medan. Atas dasar inilah kegiatan penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi perkotaan di Kota Medan perlu dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan ekonomi Kota Medan dimasa mendatang sebagai upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kota Medan dan sekitarnya (Syah et al., 2023).

II. METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yakni dengan menentukan sampel yang dianggap dapat mewakili segmen pelaku usaha dan akademisi yang ada di Kota Medan yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya. Adapun jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 50 responden yang terdiri dari pelaku usaha kecil, menengah dan besar serta kalangan akademisi yang berada di Kota Medan.

Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yaitu :

- a. Data Primer. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi riil sektor ekonomi dan hasil pengisian kuesioner dari responden. Data primer yang digunakan berupa pemberian kuesioner kepada responden dengan melakukan wawancara secara intensif dan mendalam (*in-depth interview*).
- b. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu BPS berupa Kota Medan dalam Angka, Bappeda dan SKPD terkait serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penelitian.

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Observasi, yaitu pengamatan kondisi lapangan secara langsung terhadap kondisi sektor ekonomi dan para pelaku usaha yang bergerak disemua sektor ekonomi yang ada di Kota Medan.
- b. Studi literatur, yaitu mendalami berbagai informasi penting seperti literatur dan teori yang berkaitan dengan percepatan dan pengembangan sektor ekonomi dan hasil-hasil penelitian terdahulu.
- c. Wawancara dan pengisian kuesioner, yaitu pengumpulan fakta dan data dengan cara melakukan wawancara dan pengisian kuesioner secara intensif dan mendalam, terstruktur dan sistematis.

Metode Analisis

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik tertentu dari data yang diperoleh. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi, gambar (chart) serta diagram.
- b. Analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan dimasa mendatang. Adapun alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :Location Quotient (LQ)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Location Quotien (LQ)

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan mengekspor atau memasarkan barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977). Untuk itu setiap pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi ekonomi yang dimilikinya sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Salah satu alat analisis untuk mengukur potensi unggulan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu secara sektoral dapat diukur dengan suatu indeks yang disebut *Location Quotient* (LQ). LQ digunakan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan cara membandingkan peranan perekonomian suatu daerah dengan peranan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan LQ sektoral selama kurun waktu 2006 – 2010 maka diperoleh hasil LQ Kota Medan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Hasil Perhitungan LQ Sektoral Kota Medan

SEKTOR	TAHUN					Rerata
	2006	2007	2008	2009	2010	
Pertanian	0.102	0.101	0.098	0.096	0.092	0.098
Pertambangan dan Penggalian	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
Industri Pengolahan	0.625	0.625	0.629	0.613	0.608	0.620
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.022	1.945	1.938	1.901	1.887	1.939
Bangunan	1.696	1.661	1.653	1.656	1.645	1.662
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.458	1.424	1.411	1.431	1.448	1.434
Pengangkutan dan Komunikasi	2.181	2.177	2.153	2.156	2.091	2.152
Keuangan dan Jasa Perusahaan	2.113	2.103	2.075	1.984	1.933	2.042
Jasa-Jasa	1.083	1.060	1.032	1.025	1.021	1.044

Sumber : BPS dalam Angka (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan LQ diperoleh gambaran potensi ekonomi Kota Medan secara sektoral adalah sebagai berikut:

- Sektor ekonomi yang berkoefisien $LQ < 1$ adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor ekonomi tersebut tidak menjadi sektor unggulan dan kurang dapat diandalkan kontribusinya dalam mendorong perekonomian Kota Medan dimasa mendatang.
- Sektor ekonomi yang berkoefisien $LQ > 1$ merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi sektor unggulan disuatu daerah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh sektor unggulan Kota Medan adalah sektor listrik, gas dan air minum;

sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kota Medan karena memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kota Medan.

Selanjutnya, selain menggunakan *Location Quotient* (LQ), potensi ekonomi suatu daerah juga harus dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral serta perkembangan investasinya. Berikut ini adalah perkembangan sektor ekonomi Kota Medan secara sektoral seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perkembangan Sektor Ekonomi Kota Medan

Sektor Ekonomi	LQ	Pert. Eko (%)	Share (%)	Nilai Investasi (Rp. Miliar)
Pertanian	0.098	3,48	2,78	347,38
Pertambangan & Penggalian	0.002	-6,55	0,01	0,84
Industri Pengolahan	0.620	4,02	15,54	2.782,23
Listrik, Gas dan Air Minum	1.939	3,45	1,76	798,99
Bangunan	1.662	7,39	9,66	1.742,26
Perdagangan, Hotel & Restoran	1.434	7,19	26,28	3.027,34
Pengangkutan & Komunikasi	2.152	8,74	19,17	2.500,92
Keuangan & Jasa Perusahaan	2.042	8,70	14,22	2.482,85
Jasa-Jasa	1.044	7,10	10,58	737,72

Sumber : BPS dalam Angka (diolah)

Berdasarkan data perkembangan sektor ekonomi secara sektoral maka potensi ekonomi yang memiliki prospek dan mampu menjadi sektor unggulan serta menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dimasa mendatang bagi perekonomian Kota Medan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor industri pengolahan, sektor bangunan (konstruksi) dan sektor jasa-jasa juga diharapkan mampu menjadi penggerak dan pendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kota Medan dimasa mendatang.

Srategi Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Kegiatan koperasi dan UMKM yang mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh wilayah Kota Medan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar rakyat, maka pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan Kota Medan. Hal ini mengingat perannya sebagai penyeimbang pemerataan, penyumbang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan meningkatkan peran dan kemampuan koperasi UMKM maka kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat banyak akan meningkat.

Keberadaan koperasi dan UMKM di Kota Medan relatif cukup banyak dan mendominasi dalam perekonomian Kota Medan. Tetapi dengan jumlah yang banyak tersebut belum didukung dengan kualitas yang memadai. Hal ini menyebabkan kontribusi terhadap pengembangan usaha rakyat, penyerapan tenaga kerja dan perekonomian secara umum kurang optimal. Adapun sejumlah masalah koperasi dan UMKM di Kota Medan, antara lain:

1. Masih rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM.
2. Terbatasnya akses kepada sumber daya produktif termasuk akses keuangan.
3. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.
4. Kurang kondusifnya iklim usaha.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Medan, maka diperlukan model pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik dari usaha UMKM yang ada. Berdasarkan profil dan keadaan jenis usaha UMKM di Kota Medan yang sangat bervariasi baik jenis maupun skala usahanya maka pada tahap awal untuk model pengembangan usaha UMKM dapat dilakukan melalui pendekatan kluster usaha. Pendekatan kluster adalah upaya untuk mengelompokkan industri atau usaha inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, informasi, teknologi, sumber daya alam serta lembaga-lembaga terkait.

Pendekatan kluster usaha ini dinilai strategis karena bersifat terintegrasi, meningkatkan daya tawar dan lebih menguntungkan dan tidak hanya efisiensi biaya tetapi juga cara untuk mengatur beberapa aktivitas dalam pengembangan ekonomi wilayah. Pendekatan kluster juga mampu menstimulasi inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku dalam hubungan hulu-hilir serta mampu memberikan kerangka untuk menghadapi tantangan globalisasi. Disamping itu kluster juga mendorong peningkatan keterkaitan sosial dan peningkatan keahlian masing-masing anggota kluster. Terkait dengan model pengembangan usaha UMKM di Kota Medan maka model kluster usaha yang sesuai untuk dibentuk berawal dari sentra industri dan sentra industri yang dihubungkan dengan pola kluster misalnya sentra bahan baku, sentra produksi, sentra pemasaran dan faktor terkait lainnya.



Gambar 3.1. Model Pengembangan UMKM

Selain pendekatan kluster usaha maka model pengembangan usaha UMKM yang ada di Kota Medan dapat dilakukan melalui pendekatan berbagai aspek, seperti aspek legalitas, aspek modal, aspek manajerial, aspek produksi, aspek ketenagakerjaan dan aspek pemasaran. Pendekatan melalui berbagai aspek ini dapat dilakukan melalui berbagai kursus singkat (suskat) yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga swasta yang berkomitmen dan berkompeten untuk melakukan pengembangan usaha UMKM. Adapun model pengembangan untuk usaha UMKM yang ada di Kota Medan dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini.

Sementara itu, model pembinaan untuk pelaku usaha UMKM perlu dilakukan secara berjenjang dengan menetapkan target yang terukur, seperti meningkatkan kegiatan usaha dari lokasi yang tidak permanen menjadi permanen atau dari usaha informal menjadi usaha legal-formal. Selanjutnya usaha permanen kategori mikro ditingkatkan menjadi usaha atau industri kecil dan dari kategori usaha kecil dapat diperluas jangkauan bisnisnya sehingga mampu menjadi usaha menengah dan besar dengan tata kelola bisnis yang lebih baik.



Gambar 3.2. Jenjang Pengembangan Usaha untuk UMKM

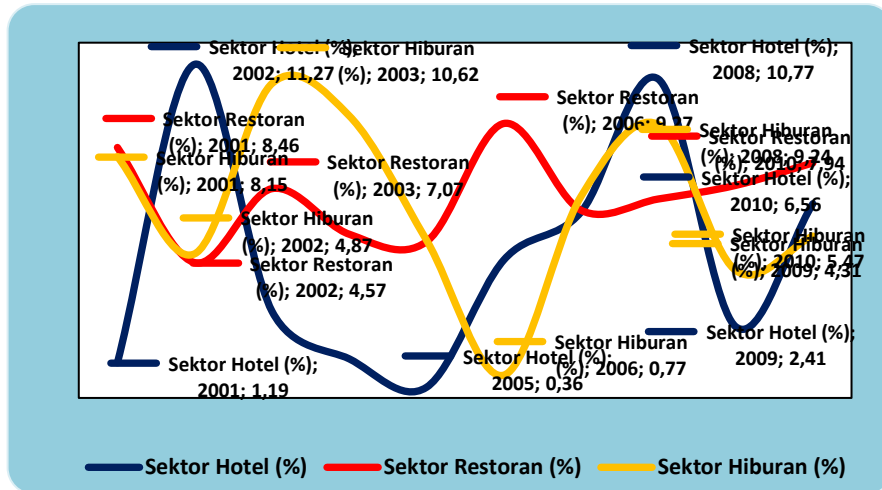
Melalui pembinaan secara berjenjang ini nantinya diharapkan akan terjadi peningkatan kelas dari jenis usaha sektor informal menjadi jenis usaha mikro formal. Begitupun untuk jenjang berikutnya dari jenis usaha mikro formal meningkat menjadi jenis usaha kecil dan seterusnya hingga mengalami peningkatan menjadi jenis usaha menengah dan besar. Proses pembinaan secara berjenjang ini dapat dilakukan apabila ada komitmen dan kemauan dari semua pihak baik pemerintah daerah, BUMN, swasta dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang secara bersama-sama berkeinginan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terutama pelaku usaha UMKM.

Dengan demikian, melalui pembinaan secara berjenjang ini akan terpantau perkembangan dari masing-masing jenjang pembinaan yang telah dilakukan dan dapat terlihat berapa banyak jenis usaha yang mengalami peningkatan kelas setiap tahunnya. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta yang bergerak dibidang pengembangan usaha diharapkan mau dan bersungguh-sungguh melakukan pembinaan usaha ini secara berjenjang dan berkomitmen untuk menjalankannya. Meskipun peran koperasi dan UMKM semakin menunjukkan peningkatan, namun untuk mencapai sasaran dan target dalam RPJMD Kota Medan Periode 2011 – 2015 maka perlu dilakukan upaya tindak lanjut agar langkah-langkah kebijakan yang telah dirintis dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam rangka itu, beberapa tindak lanjut kedepan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Medan untuk mempercepat peran dan kontribusi koperasi dan UMKM di Kota Medan, antara lain:

1. Perlu dilakukan penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan penjaminan kredit untuk koperasi dan UMKM termasuk produk turunannya seperti kegiatan usaha simpan pinjam, kemitraan pola subkontrak dan peningkatan fasilitas perizinan serta formalisasi badan usaha bagi koperasi dan UMKM.
2. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) yang menyeluruh dan terpadu, termasuk pengakuan status LKM tradisional yang berbentuk nonbank dan nonkoperasi serta perlu diikuti dengan skim pembinaan.
3. Untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM khususnya ke lembaga keuangan perbankan maka Pemerintah Kota Medan dapat memberikan bantuan kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk memfasilitasi pengusaha UMKM agar dapat menyediakan agunan tanah bersertifikat.
4. Pemerintah Kota Medan memfasilitasi program kemitraan antara koperasi dan perbankan sebagai sumber pembiayaan untuk lembaga keuangan mikro (LKM) terutama koperasi simpan pinjam (KSP).
5. Menumbuhkan dan memasyarakatkan kewirausahaan serta pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama koperasi dan UMKM yang berbasis IPTEK.
6. Membentuk Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi di Kota Medan yang berfungsi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan teknologi informasi bagi pengembangan usaha UMKM.
7. Menyiapkan trade center dan sarana promosi sebagai pusat perdagangan dan jasa.

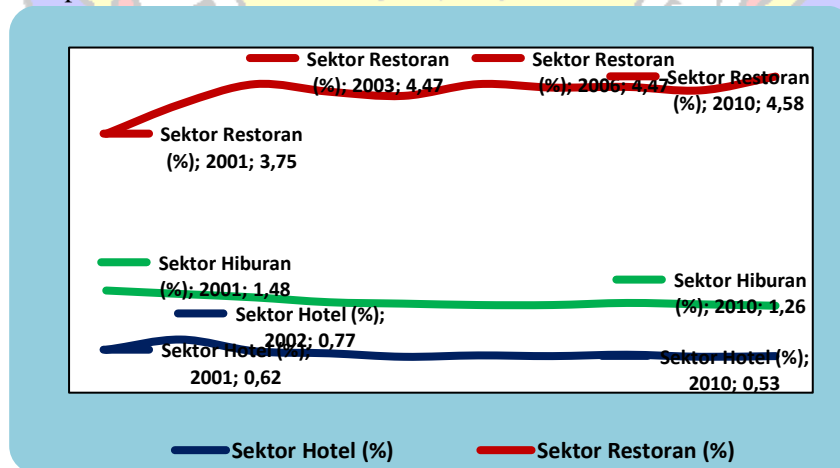
Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata

Para pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam suatu perekonomian, bila dikembangkan sektor pariwisata secara berencana dan terpadu maka peran sektor pariwisata akan melebihi sektor minyak bumi dan gas alam (migas) serta industri lainnya. Dengan demikian sektor pariwisata akan berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri.



Gambar 3.3
Pertumbuhan Sektor Hotel, Restoran & Jasa Hiburan
Kota Medan Tahun 2001 – 2010

Berdasarkan data BPS, besarnya kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi Kota Medan dapat dilihat dari perkembangan sektor hotel dan restoran serta sektor hiburan dan rekreasi. Dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor restoran memiliki laju pertumbuhan yang relatif stabil dan cenderung meningkat selama kurun waktu 2001 – 2010 dengan rata-rata tumbuh sekitar 6,84 persen. Sedangkan sektor hotel dan sektor hiburan mengalami laju pertumbuhan yang cenderung berfluktuatif dengan rata-rata tumbuh sekitar 4,78 persen untuk sektor hotel dan sektor hiburan tumbuh rata-rata sekitar 6,51 persen pertahun.



Gambar 3.4
Peranan Sektor Hotel, Restoran & Jasa Hiburan
Kota Medan Tahun 2001 – 2010

Disamping itu, dilihat dari peranan sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB Kota Medan menunjukkan bahwa sektor restoran memiliki peranan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor hotel dan sektor hiburan dengan rata-rata sekitar 4,33 persen pertahun selama kurun waktu 2001 – 2010. Sedangkan kontribusi sektor hiburan dan sektor hotel memberikan kontribusi terhadap

pembentukan PDRB Kota Medan dengan rata-rata sekitar 1,33 persen untuk sektor hiburan dan sektor hotel berkontribusi secara rata-rata sekitar 0,58 persen.

Dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Medan maka ditinjau dari sudut ekonomi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Kota Medan. Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain:

1. Memperluas kesempatan kerja.
2. Peningkatan kesempatan berusaha.
3. Peningkatan penerimaan pajak daerah.
4. Peningkatan pendapatan daerah dan nasional.
5. Mempercepat proses pemerataan pendapatan.
6. Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan.
7. Memperluas pasar produk dalam negeri.
8. Memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, para investor maupun perdagangan luar negeri.

Disamping itu, pengaruh sektor pariwisata sebagai suatu industri akan memberikan dampak yang luas bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya, antara lain:

1. Tumbuh dan berkembangnya usaha makanan dan minuman yang bersifat lokal yang banyak diminati wisatawan.
2. Tumbuh dan berkembangnya industri kecil yang menghasilkan produk cenderamata khas daerah.
3. Tumbuh dan berkembangnya restoran, cafe dan bar yang bersifat lokal tetapi diminati wisatawan.
4. Tumbuh dan berkembangnya usaha agen perjalanan dan biro perjalanan wisata lokal untuk melayani wisatawan.
5. Banyaknya perusahaan lokal yang menyelenggarakan *cultural events* untuk konsumsi wisatawan maupun masyarakat lokal.
6. Tumbuh dan berkembangnya toko-toko seperti *shop for tourist needs*.
7. Banyaknya usaha-usaha penginapan yang diminati wisatawan seperti *homestay, pension, losmen, bungalow* maupun *small inns*.
8. Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang disebut sebagai *decorative materials for hotel and resort* dengan memunculkan berbagai benda-benda seni tradisional etnis lokal.

Melihat begitu banyaknya manfaat dan keuntungan yang bakal dapat diraih maka pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan sebagai industri tidak dapat dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, akan tetapi hendaknya diperlakukan sebagai suatu bisnis yang harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, hukum permintaan dan penawaran serta strategi perdagangan yang harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Kota Medan dimasa mendatang. Berdasarkan hasil pemetaan di atas maka kebijakan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnu). Untuk mewujudkan itu semua, maka strategi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dimasa mendatang dapat dilakukan melalui:

1. Program peningkatan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Program pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.
3. Program pengembangan varian dan kualitas produk-produk wisata terutama pengembangan wisata kota dan wisata bahari. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengklasifikasi tujuan wisata menjadi ekowisata, bahari, *meeting incentive conference exhibition (MICE)*, belanja dan budaya.
4. Program koordinasi dan harmonisasi berbagai perangkat aturan yang terkait dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan.

5. Program memfasilitasi kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kemudahan akses ke tujuan wisata.
6. Program penyusunan pola kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan melalui kampanye sadar wisata.
7. Program penyusunan standar usaha dan kompetensi SDM pariwisata.
8. Program penyusunan cetak biru pengembangan pariwisata Kota Medan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Medan. Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, antara lain:

- a) Strategi untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Medan dapat dilakukan melalui:
 1. Penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan penjaminan kredit untuk koperasi dan UMKM termasuk produk turunannya.
 2. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) yang menyeluruh dan terpadu.
 3. Untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM khususnya ke lembaga keuangan perbankan maka Pemerintah Kota Medan dapat memberikan bantuan kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk memfasilitasi pengusaha UMKM agar dapat menyediakan agunan tanah bersertifikat.
 4. Pemerintah Kota Medan memfasilitasi program kemitraan antara koperasi dan perbankan sebagai sumber pembiayaan untuk lembaga keuangan mikro (LKM) terutama koperasi simpan pinjam (KSP).
 5. Membentuk Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi di Kota Medan yang berfungsi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan teknologi informasi bagi pengembangan usaha UMKM.
 6. Menyiapkan trade center dan sarana promosi sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- b) Strategi untuk pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan dapat dilakukan melalui:
 1. Program peningkatan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
 2. Program pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.
 3. Program pengembangan varian dan kualitas produk-produk wisata terutama pengembangan wisata kota dan wisata bahari. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengklasifikasi tujuan wisata menjadi ekowisata, bahari, *meeting incentive conference exhibition* (MICE), belanja dan budaya.
 4. Program koordinasi dan harmonisasi berbagai perangkat aturan yang terkait dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan.
 5. Program memfasilitasi kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kemudahan akses ke tujuan wisata.
 6. Program penyusunan pola kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan melalui kampanye sadar wisata.
 7. Program penyusunan standar usaha dan kompetensi SDM pariwisata.
 8. Program penyusunan cetak biru pengembangan pariwisata Kota Medan.

V. REFERENSI

- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Bank Indonesia, 2008. Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Gholamzadeh Chofreh, A., Goni, F. A., Ismail, S., Mohamed Shaharoun, A., Klemeš, J. J., & Zeinalnezhad, M. (2016). A master plan for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems (part I): concept and methodology. *Journal of Cleaner Production*, 136(part I), 176–182. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.140>
- Hussain, Z., & Nadeem, O. (2021). The nexus between growth strategies of master plans and spatial dynamics of a metropolitan city: The case of Lahore, Pakistan. *Land Use Policy*, 109(January), 105609. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105609>
- Hutapea, A., Koleangan, R. A. M., & Rorong, I. P. F. (2020). Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 1–11.
- Pratiwi, A., Saepudin, E. A., Hotimah, N., Maulidah, S., Prodi, Y., Publik, A., Sosial, I., & Politik, I. (2024). Analisis dalam Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 1(2), 179–183.
- Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
- Prayoga, B. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kota Medan. *Journal Economics and Strategy*, 4(1), 42–51. <https://doi.org/10.36490/jes.v4i1.692>
- Sari, Y. K., Sholihah, Q., & Wanusmawatie, I. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Kajian Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro pada Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 214–224. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.11>
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi Dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>
- Syah, A., Nawawi, Z. M., Daulay, A. N., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). The Effect of Industrial Agglomeration, Labor Force, and Human Capital Investment on Economic Growth in Medan City In The Perspective of Islamic Economics. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 2140–2151.